



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 900. 75 / 751 / Wk-Pyk/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALIKOTA PAYAKUMBUH ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai kewenangan menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

P.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

L.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03) ;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);

1.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam kolom 3 dengan jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
 2. Saudara Pimpinan BPD Sumatera Barat Cabang Payakumbuh di Payakumbuh.
 3. Saudara Kepala OPD se Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
 4. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 5. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
 6. Arsip.
- L.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 900.15 / 251 / Wk-Pyk/2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	S K P D	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH	CANDRA WISNU PRASTOWO, Amd NIP. 19860331 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran
2.	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	USNELA WARNI NIP. 19750823 200701 2 006	Bendahara Pengeluaran
3	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	YONE FITRIA NIP. 19800506 201406 2 006	Bendahara Pengeluaran
4	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	PIFIT SANDRA DEWI NIP. 19810810 201001 2 004	Bendahara Pengeluaran
5	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	RIKE AMLIA DJUSARI NIP. 19780727 201406 2 003	Bendahara Pengeluaran
6	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	ANDAYANI NIP. 19841101 201406 2 006	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS SOSIAL	RUHAMA, A.Md NIP. 19820510 200901 2 004	Bendahara Pengeluaran
8.	SEKRETARIAT DPRD	BUSTAMAM NIP. 19690906 200501 1 001	Bendahara Pengeluaran
9.	SEKRETARIAT DAERAH	HENDRA RAMATEDY, A.Md NIP. 19830613 201001 011	Bendahara Pengeluaran
		YETMAWATI NIP. 19740430 199403 2 003	Bendahara Penerimaan

6.

NO	S K P D	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
10.	DINAS KOPERASI DAN UKM	MISHARTUTI, SE NIP. 19850502 201001 2 011	Bendahara Pengeluaran
		BETRI YULIANA NIP. 19780713 201001 2 002	Bendahara Penerimaan
11.	BADAN KEUANGAN DAERAH	DESSY NOVIA, A.Md NIP. 19780731 200801 2 003	Bendahara Pengeluaran
		DEDI SLAMET, S.Sos NIP. 19800331 200701 1 004	Bendahara Penerimaan
		YESSY HANDAYANI, S.Sos NIP. 19810501 200701 2 005	Bendahara Pengeluaran SKPKD
	1. BLUD FASILITASI PEMBIAYAAN	MUTHIA INDRAYETTI, A.Md NIP. 19810523 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran
		HAMIDAH, SE NIP. 19790603 200701 2 003	Bendahara Penerimaan
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MUSLIM NIP. 19620515 199803 1 003	Bendahara Pengeluaran
		M. ISMAIL NIP. 19830303 200701 1 003	Bendahara Penerimaan
13.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	MARDIANA NIP. 19750603 200701 2 006	Bendahara Pengeluaran
		YANTI, SE NIP. 19760520 201406 2 001	Bendahara Penerimaan
14.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ASWIL FIANA NIP. 19810921 200701 2 004	Bendahara Pengeluaran
		AZWARDI NIP. 19740407 200604 1 011	Bendahara Penerimaan

1.

NO	S K P D	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
15.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASWIRMAN, SE NIP. 19770909 201101 1 001	Bendahara Pengeluaran
16.	DINAS KESEHATAN	MISRAWATI NIP. 19780507 201406 2 007	Bendahara Pengeluaran
	1. BLUD RSUD dr. ADNAN WD	SRI PADRITA, A.Md NIP. 19760511 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
	2. BLUD PUSKESMAS IBUH	TRI RINALDI, St. Ars NIP. 19680215 200604 1 004	Bendahara Penerimaan
		FITRIANI GUSTI, A.Md.PK NIP. 19800805 200604 2 009	Bendahara Pengeluaran
		NELDA HERAWATI, AMKG NIP. 19740201 199403 2 003	Bendahara Penerimaan
	3. BLUD PUSKESMAS PARIT RANTANG	NILA, AMKG NIP. 19890128 201101 2 001	Bendahara Pengeluaran
		YENI SRI PUSPITA, A.Md, Pk NIP. 19810131 200803 2 001	Bendahara Penerimaan
	4. BLUD PUSKESMAS PAYOLANSEK	ANANDA PUTRI, AMKG NIP. 19860313 200901 2 001	Bendahara Pengeluaran
		DEWI YENDRIANI, Amd.PK NIP. 19810531 201001 2 005	Bendahara Penerimaan
	5. BLUD PUSKESMAS TIAKAR	SISKA YUNITA, AMG NIP. 19820626 200604 2 010	Bendahara Pengeluaran
		SRI DEFITRI, A.Md, Kep NIP. 19800908 201406 2 002	Bendahara Penerimaan

2.

NO	SKPD	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
	6. BLUD PUSKESMAS AIR TABIT	SRIFATUL HAYATI, AMG NIP.19770131 201101 2 001	Bendahara Pengeluaran
		MARNIS, A.Md NIP.19760302 201406 2 004	Bendahara Penerimaan
	7. BLUD PUSKESMAS LAMPASI	APRILA YFENSI, A.Md, Kep NIP. 19850405 200803 2 001	Bendahara Pengeluaran
		NOVI FITRI RIANDINI. N, A.Md, RM NIP. 19861128 201001 2 008	Bendahara Penerimaan
	8. BLUD PUSKESMAS TAROK	ARIYANI YULIANTI, AMKG NIP. 19880710 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
		ANGELA ELGARINA, A.Md, PK NIP. 19850929 201101 2 002	Bendahara Penerimaan
	9. BLUD PUSKESMAS PADANG KARAMBIA	IRFINA DWI PUTRI, AMG NIP. 19850626 200901 2 004	Bendahara Pengeluaran
		NELIA IRAWATI, A.Md. Keb NIP. 19660716 198803 2 005	Bendahara Penerimaan
17.	DINAS PERHUBUNGAN	MARLINA, SE NIP.19890918 201101 2 003	Bendahara Pengeluaran
		UNDRIA PUTRA, S.Sos NIP. 19810831 201001 1 003	Bendahara Penerimaan
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RENTI ELFIRA, SE NIP. 19840419 201001 2 011	Bendahara Pengeluaran
		RENILA IDRYANI, A.Md NIP. 19890410 201101 2 006	Bendahara Penerimaan

NO	S K P D	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
19.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	AFRIZAL NIP. 19720809 200601 1 007	Bendahara Pengeluaran
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos NIP. 19840614 200604 1 008	Bendahara Pengeluaran
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	GUSTINA, A. Md NIP. 19870825 201101 2 001	Bendahara Pengeluaran
22.	DINAS PERTANIAN	YOGI NOVERDI RIZAL, S.Pt NIP. 19841125 201101 1 002	Bendahara Pengeluaran
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	YUNIFA MARLIA, SP NIP. 19790207 200801 2 004	Bendahara Penerimaan
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JHONSON, A.Md NIP. 19811212 201001 1 014	Bendahara Pengeluaran
25.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	AIDIL AKBAR RAMADHAN NIP. 19870525 200604 1 003	Bendahara Penerimaan
26.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	LISA MONA SARI, A.Md NIP. 19880503 201101 2 002	Bendahara Pengeluaran
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SUNDESRI YOZE, SE NIP. 19861227 200901 2 001	Bendahara Pengeluaran
28.	DINAS KETAHANAN PANGAN	MARNI YANTI NIP. 19780316 200701 2 003	Bendahara Pengeluaran
		MERY SUSANTI NIP. 19740530 200901 2 002	Bendahara Penerimaan
		RONNI BUSRA NIP. 19780922 200312 1 004	Bendahara Pengeluaran
		ZHORAIYA MUKHLISA NIP. 19850926 201001 2 008	Bendahara Pengeluaran

1.

NO	S K P D	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
29.	DINAS PENDIDIKAN	YUHERNAWATI NIP. 19820621 200701 2 014	Bendahara Pengeluaran
30.	DINAS KOM'JNIKASI DAN INFORMATIKA	MEGAWATI NIP. 19820515 201001 2 002	Bendahara Penerimaan
31.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	DEWI KOSRITA, S.Kom NIP. 19830307 201503 2 002	Bendahara Pengeluaran
		RODA RIA NOFRIZA NIP. 19861119 200604 2 004	Bendahara Pengeluaran

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

t.